

KEKERASAN SIMBOLIK DI MIMBAR SABDA: PELECEHAN TERHADAP KELUHURAN LITURGI EKARISTI

Yan Yusuf Subu¹

Dosen STK Santo Yakobus Merauke, yanyusuf@stkyakobus.ac.id

Don Wea S. Turu²

Dosen STK Santo Yakobus Merauke, romodonwea@stkyakobus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan bukti bahwa kekerasan simbolik di mimbar sabda merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap keluhuran liturgi ekaristi. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dibagikan kepada 10 informan yang adalah anggota paroki yang tersebar di dua paroki di kawasan pinggiran kota Merauke (Wendu dan Kuper). Hasil pengolahan data, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa kekerasan simbolik kerap dilakukan oleh otoritas Gereja di mimbar sabda, tanpa disadari, dan berdampak pada pelecehan terhadap keluhuran liturgi ekaristi yang merupakan satu kesatuan yang integral yang dimulai dengan ritus pembuka dan berakhir dengan ritus penutup. Apalagi liturgi sabda, yang berpusat di mimbar sabda, merupakan persiapan amat penting untuk masuk ke dalam perayaan misteri keselamatan yang dipuncaki oleh liturgi ekaristi, yang berpusat di atas altar suci. Selain melecehkan keluhuran liturgi ekaristi, kekerasan simbolik oleh otoritas Gereja di mimbar sabda juga membawa dampak terhadap ketidaknyamanan umat secara batiniah ketika mengikuti perayaan ekaristi dan juga terhadap imam itu sendiri sebagai pemimpin perayaan ekaristi. Temuan ini menyadarkan setiap otoritas Gereja untuk menggunakan mimbar sabda sesuai dengan fungsinya yang kudus. Selain itu, imam sebagai pemimpin liturgi ekaristi perlu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sabda Allah kepada umat beriman melalui homili di mimbar sabda supaya dapat dimengerti dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari.

Kata Kunci: Kekerasan Simbolik, Mimbar Sabda, Otoritas Gereja.

PENDAHULUAN

Salah satu media komunikasi yang paling efektif dan sangat sering digunakan adalah bahasa. Melalui bahasa para pelaku komunikasi dapat mengekspresikan banyak hal sesuai dengan tujuan yang mau dicapai dengan tetap berpijak di atas kaidah-kaidah berbahasa secara baik dan benar. Semulia apapun pesan yang mau disampaikan, tetapi jika kaidah berkomunikasi (berbahasa) diabaikan, maka pesan tidak akan kesampaian atau tidak akan diterima secara tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pelaku atau bahkan dapat memicu terjadinya konflik. Salah satu kaidah dalam berbahasa yang harus dipahami dengan baik oleh setiap orang adalah kesantunan berbahasa dan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks. Brown dan Levinson dalam Alabdali (2019) menegaskan bahwa setiap pembicara harus memperhatikan aspek kesantunan berbahasa agar isi pembicaraan tidak membangkitkan kekecewaan atau kemarahan pihak yang mendengar atau yang menerimanya. Lakoff dalam Syahrul (2008) mendeskripsikan bahwa kesantunan adalah sistem hubungan interpersonal untuk mempermudah interaksi dengan meminimalisir potensi konflik dan konfrontasi. Frasser dalam Chaer (2012) mendeskripsikan kesantunan berbahasa sebagai properti yang harus disepakati agar pembicara dan mitranya tidak melampaui hak-haknya dalam berbicara.

Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kesantunan dalam berbahasa kerap kurang diperhatikan oleh pembicara, khususnya di hadapan publik. Dalam konteks agama, ada tokoh

agama yang kurang bijaksana menggunakan diksi atau dengan sengaja mengumbar kata-kata yang bernada sindiran, menghakimi, memprovokasi bahkan menyalahkan dalam mimbar pengajaran resmi sehingga ada penganut (dari agama sendiri maupun agama lain) yang merasa tersinggung, tersakiti dan terluka (Gasperz, 2022). Jika pola ini dilakukan secara frekuentatif, dengan alasan apapun, akan berdampak buruk terhadap pihak yang merasa terzolimi (sebagai korban) dan dapat memicu terjadinya konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Salah satu contoh yang hingga saat ini masih membekas dan menumbuhkan rasa kecewa di kalangan penganut agama non muslim adalah kata-kata Habib Rizieq yang kalau dikaji dan dianalisis dari segi kode etik berbahasa sangat tidak etis, lantaran syarat dengan kebencian, kekerasan, permusuhan dan provokasi yang diucapkan terhadap Basuki Tjahya Purnama (Gubernur DKI Jakarta), sebagai yang dinilai sebagai penista agama islam, pada bulan April 2017 (Yuliani, 2017). Habib Rizieq menggunakan mimbar resmi dalam masjid, dan dalam statusnya sebagai seorang habib, untuk mengumbar kebencian terhadap Ahok dan juga penganut agama lain yang non muslim, hal mana sangat tidak diterima baik oleh penganut agama non muslim maupun oleh para tokoh muslim sendiri, lantaran bertentangan dengan ajaran islam, sebagai agama yang membawa kesejukan dan kedamaian (Yuliani, 2017).

Habib Rizieq melakukan dua hal yang secara kaidah berbahasa merupakan sebuah pelanggaran; pertama, menggunakan pilihan kata yang bertentangan dengan kesantunan berbahasa dan tidak sesuai dengan konteks. Kedua, Habib Rizieq menggunakan ruang publik keagamaan untuk memprovokasi penganut agama islam dan meneror penganut agama yang bukan islam (Brown dan Levinson dalam Alabdali, 2019). Apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq merupakan sebuah kekerasan verbal, kekerasan struktural dan kekerasan simbolik (Galtung, 1971).

Kekerasan verbal adalah penggunaan bahasa yang tidak santun yang mengganggu ketenangan pendengar atau lawan bicara secara psikologis (Amstrong dalam Eriyanti, 2018, Zikrillah, dkk. 2021). Menurut Keraf (1994), bahasa mempunyai peranan sentral dalam perkembangan sosial dan emosional, dan dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni bahasa verbal (ucapan, simbol, kata-kata) dan non verbal (fisik). Penggunaan bahasa sebagai sarana sentral dalam berkomunikasi harus memperhatikan tata sopan santun (Zikrillah, dkk, 2021). Jika diabaikan tata sopan santun maka akan terjadi kekerasan verbal maupun kekerasan simbolik, bahkan kekerasan struktural.

Jika kekerasan verbal dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu, tidak demikian halnya dengan kekerasan struktural dan kekerasan simbolik. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi karena struktur sosial di dalam masyarakat (Galtung, 1971). Pelaku kekerasan structural cenderung tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kekerasan karena berkaitan dengan peran dan kewenangan yang ada padanya. Kekerasan simbolik adalah istilah khas yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu. Kekerasan simbolik merujuk pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak disadari, dan tidak dirasakan, baik oleh pelaku maupun oleh korbannya (Fatmawati dan Solikin, 2020). Kekerasan simbolik dapat diimplementasikan kapan dan di mana saja serta dalam situasi apa saja; misalnya di dalam keluarga (antara orang tua dan anak), dalam dunia pendidikan (antara guru dan peserta didik),

dalam dunia kerja (antara majikan dan bawahan atau pimpinan dan staf), dalam ruang aktivitas keagamaan (antara pimpinan agama dan anggotanya), dan berbagai bentuk kehidupan lainnya.

Salah satu bentuk kekerasan simbolik yang paling sering terjadi adalah dalam dunia pendidikan. Ketika seorang guru menyatakan bahwa harga dirinya lebih tinggi karena statusnya sebagai pendidik dan harus dihormati oleh peserta didik, pada saat itu secara tidak sadar dia telah melakukan kekerasan simbolik terhadap peserta didik, tanpa disadari oleh dirinya sendiri sebagai pendidik maupun oleh peserta didik (Fatmawati dan Solikin, 2020). Lebih lanjut, ketika seorang guru mengatakan kepada peserta didik malas atau bodoh karena tidak mengerjakan tugas dan nilainya selalu rendah, walaupun dengan tujuan edukatif, pada saat yang sama guru tersebut melakukan kekerasan simbolik terhadap peserta didik.

Kekerasan simbolik dapat juga diekspresikan melalui gesture. Ketika seorang guru memergoki anak didiknya menyontek dan memberi reaksi dengan menatap anak itu dengan tatapan tajam dan sinis, pada saat itu terjadi kekerasan secara simbolik. Pola yang sama juga kerap dilakukan dalam keluarga, dalam komunitas, dan di tempat kerja.

Kekerasan simbolik dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada kekerasan simbolik yang dilakukan oleh otoritas Gereja katolik di mimbar sabda dalam hubungannya dengan kegiatan resmi liturgi, yakni liturgi ekaristi. Bagi orang katolik, mimbar sabda adalah bagian yang paling utama dari liturgi Ekaristi. Ada dua bagian utama dalam liturgi ekaristi, yakni liturgi sabda yang berpusat di mimbar sabda dan liturgi ekaristi yang berpusat di altar sebagai simbol pengorbanan Kristus di atas kayu salib (PUMR, 296 dan 309).

Mimbar sabda adalah media untuk pewartaan sabda Allah, iman dan moral yang merupakan bagian yang integral dari perayaan resmi Gereja katolik yang seyogyanya membawa kesejukan, kedamaian, kekuatan dan ketenangan batin (Gasperz, 2022). Melalui homili yakni penjelasan terhadap sabda Tuhan yang telah diwartakan pemimpin liturgi ekaristi membantu menyadarkan umat Allah, memberi semangat, mengarahkan, menguatkan, menebarkan kedamaian dan kasih, yang pada akhirnya memampukan umat Allah yang hadir untuk menghadapi berbagai persoalan hidup dalam kesehariannya.

Melalui mimbar sabda, imam sebagai pemimpin perayaan ekaristi, menghadirkan dirinya sebagai pejabat resmi Gereja yang mempunyai otoritas untuk mewartakan ajaran iman dan moral agar umat Allah yang mendengarnya semakin bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan injili, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus sendiri, khususnya dalam hal iman, harapan dan kasih. Di atas mimbar sabda, seorang imam mewakili dan menghadirkan Kristus sebagai kepala Gereja serentak sebagai pemimpin utama dan sesungguhnya dari liturgi ekaristi (PUMR, 55).

Sayangnya, mimbar sabda, dengan fungsinya yang amat luhur itu, kerap juga dijadikan sebagai media efektif terjadinya kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan simbolik maupun kekerasan struktural. Banyak umat katolik yang merasa terganggu dengan metode pewartaan otoritas Gereja selama di mimbar sabda, lantaran menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya, bahkan terkesan vulgar, menohok, sarkastis, membangkitkan kekecewaan, ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan umat. Kesadaran otoritas Gereja sebagai pemimpin liturgi ekaristi, dengan kewenangan yang diterimanya untuk mewartakan

firman Allah, berkat sakramen imamat suci yang telah dimeteraikan kepadanya, jika tidak ekstra hati-hati, dapat memberi ruang kepada mereka untuk jatuh ke dalam kekerasan simbolik tanpa mereka menyadarinya. Apalagi pola pewartaan melalui mimbar sabda bersifat monolog, dengan pelaku utama pewartaan yang hadir secara kasat mata di tengah gereja dan di hadapan umat Allah adalah imam sebagai otoritas resmi Gereja katolik. Kenyataan yang ada menjadi fenomena yang amat menarik untuk dipelajari, dievaluasi, direfleksikan dan selanjutnya dibahas demi sebuah pembaharuan yang signifikan, yakni pengembalian peran mimbar sabda sebagai tempat suci untukewartakan khabar gembira dari Tuhan dan kesadaran para imam sebagai otoritas resmi Gereja yang menjadi alat yang dipakai Tuhan melalui meterai kudus, untukewartakan khabar sukacitaNya.

Fakta-fakta sebagaimana dideskripsikan di atas mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam kekerasan simbolik di mimbar pewartaan melalui dua rumusan permasalahan berikut ini: pertama, model-model kekerasan simbolik di mimbar sabda. Kedua, mengapa kekerasan simbolik kerap terjadi di mimbar sabda, dengan pelaku utamanya adalah otoritas Gereja. Ketiga, bagaimana dampak kekerasan simbolik oleh otoritas Gereja di mimbar sabda terhadap keluhuran liturgi ekaristi dan terhadap umat Allah yang hadir dalam liturgi ekaristi tersebut. Melalui ketiga rumusan masalah ini peneliti akan menemukan elemen-elemen kunci yang berperan penting dalam kekerasan simbolik di ruang liturgi suci dengan konsekwensinya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik adalah bagian dari kekerasan sosial. Tokoh yang paling terkenal yang membahas tentang kekerasan sosial dan terlibat dalam upaya untuk mengatasinya adalah Johan Galtung (Hendry, 2008). Menurut Galtung (1971) kekerasan sosial adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga dalam bentuk perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Selanjutnya Galtung mengkategorikan kekerasan sosial ke dalam tiga tipe, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya (Hendry, 2003).

Ada beberapa teori tentang kekerasan sosial. Menurut Santoso (2002), teori kekerasan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar (Syukron, 2017). Pertama, Teori kekerasan sosial sebagai tindakan aktor secara individu maupun kelompok. Sebagai tindakan individu, kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu dalam bentuk kekerasan fisik (pemukulan atau penganiayaan) dan kekerasan secara verbal (berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang). Kekerasan kelompok (kolektif) adalah kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dan berwujud sebagaimana kekerasan individu. Kedua, teori kekerasan struktural yakni kekerasan yang terbentuk dalam suatu sistem sosial atau suatu struktur. Ketiga, teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur. Menurut teori ini konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat (Bellah, 2000). Kekerasan simbolik merupakan bagian dari kekerasan individu, kolektif, dan struktur, karena dapat dilakukan oleh individu atau suatu kelompok, dan dapat terjadi karena kekuatan sebuah struktur.

Tokoh penting yang membahas tentang kekerasan simbolik adalah Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis yang sangat kritis, dengan pemikiran sosialnya yang sangat fokus pada kajian bahasa sebagai instrumen tindakan atau praktek sosial (Ningtyas, 2015). Menurut Bourdieu (1991) kekerasan simbolik adalah imposisi atau pemaksaan untuk memberlakukan sistem simbol dan arti (budaya) kelompok atau kelas atas dengan cara perlahan, tidak tampak dan halus (*misrecognition*) sehingga orang-orang yang menjadi sasaran atau korban merasakan dan mengakuinya sebagai sesuatu yang sah, demi kepentingan kelompok yang mendominasi (Martono, 2012). Dalam dunia pendidikan, kekerasan simbolik terjadi manakala kata, kalimat, uraian dan gambar-gambar yang ada di dalam buku pelajaran mencerminkan kelas elit dan menjadi hal yang lumrah bagi peserta didik, khususnya yang berasal dari kelas menengah ke bawah (Fachruddin, 2018).

Menurut Bordieu kekerasan simbolik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan (Jenkin, 1991). Kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan dan muncul sebagai usaha kelas dominan untuk melanggengkan dominasi dalam struktur sosial. Modal simbolik merupakan media yang memberi ruang dan memperlancar hubungan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan simbolik berjalan dengan perlahan namun pasti; dan kelas terdominasi tidak menyadari bahwa mereka menjadi objek kekerasan dalam bentuk menerima apa yang dipaksakan secara halus oleh kelas dominan. Kekerasan simbolik dihubungkan dan didasarkan pada kenyataan bahwa seluruh tatanan masyarakat dan kontrol diperoleh melalui mekanisme tidak langsung dan mekanisme kultural. Menurut Jenkin (1991), kekerasan simbolik dimulai dengan imposisi kebiasaan budaya (*cultural arbitrary*) melalui tiga model, yaitu (a) diseminasi pendidikan yang terjadi melalui interaksi dengan kelompok sejawat secara tidak formal, (b) pendidikan keluarga dan (c) pendidikan yang terlembaga.

Dalam kehidupan sehari-hari kekuasaan simbolik jarang ditampakkan dalam bentuk kekuatan fisik, namun lebih secara simbolik (Ningtyas, 2015). Hal ini mencirikan bentuk legitimasi yang telah dimiliki oleh semua orang. Bagi Bourdieu kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang tidak nampak (*invisible power*). Menurut Bourdieu, konsep kekuasaan simbolik dan kekerasan simbolik dikembangkan dalam konteks menganalisis pertukaran hadiah dalam kebiasaan masyarakat Kabylia. Tindakan ini, menurut Bourdieu, adalah bentuk penerapan kekuasaan namun secara tersamar. Pihak yang menerima hadiah akan terikat dengan pemberi hadiah dalam hubungan hutang budi. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa memberi merupakan suatu strategi untuk memiliki, dengan cara mengikat orang lain dan menyelubunginya melalui sikap kedermawanan (Jenkin, 1992). Inilah bentuk nyata dari kekerasan simbolik menurut Boudieu. Kekerasan simbolik itu diekspresikan secara lembut, tidak terikat, dibatinkan dalam sikap-sikap kepercayaan, kewajiban, loyalitas pribadi, hadiah, hutang, kesalehan, yang semuanya dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kebaikan dalam etika kehormatan (Ningtyas, 2015).

Kekerasan simbolik menurut Jenkin (1991) kerap disebut sebagai kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*). Menurut Fachruddin (2018), kekerasan simbolik dapat dilakukan melalui dua cara, yakni (a) cara yang halus (*eufimisme*) dalam bentuk kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, dan belas kasihan. Dalam eufimisme kekerasan simbolik biasanya tidak tampak, bekerja secara halus dan tidak dapat dikenali. (b) Cara sensoris, yang nampak dalam pelestarian semua bentuk

nilai yang dianggap sebagai moral kehormatan, seperti halnya sopan santun, kesucian, kedermawanan dan sebagainya yang dipertentangkan dengan ‘moral rendah’ seperti kekerasan, kriminal, ketidakpantasan dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya (Martono, 2012). Sensoris menjadikan kekerasan simbolik sebagai bentuk pelestarian semua nilai yang dianggap sebagai ‘moral kehormatan’ (Ningtyas, 2015).

Sasaran utama dari kekerasan simbolik adalah kelompok yang lebih kecil, lebih rendah status sosialnya dan lebih lemah dalam aspek apa saja. Menurut Bourdieu dalam Martono (2012) konsep kekerasan simbolik dipakai untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan kelompok kelas atas untuk memaksakan ideologi, budaya, kebiasaan, dan gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah. Bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh kelompok dominan tidak secara terang-terangan, misalnya melalui pendidikan, tayangan televisi atau wacana di media masa (Wahyudin, 2015). Masyarakat kelas bawah yang menjadi korban kekerasan secara tidak langsung dipaksa untuk menerima, mencoba, mempraktekkan dan mengikuti kebiasaan kelas atas sebagai sebuah kebiasaan yang juga pantas baginya. Kekerasan simbolik sering dianggap sebagai gejala yang wajar dalam kehidupan dan korban rela menjadi objek dari kekerasan tersebut. Mekanisme kekerasan simbolik dilakukan secara halus melalui berbagai macam wacana sehingga korban kekerasan simbolik tidak terlihat mengalami tekanan (menderita sebagai konsekwensi dari kekerasan yang diterimanya) sebagaimana yang dialami oleh mereka yang menjadi korban dari kekerasan fisik.

2. Mimbar Sabda sebagai Media Pewartaan

Mimbar sabda adalah tempat dan pusat untuk pewartaan sabda Allah. Dalam tata ruang gereja katolik, posisi mimbar sabda berada di samping altar utama yang menjadi simbol kesatuan antara sabda Yesus dengan pengorbananNya di kayu salib yang merupakan perwujudan dan puncak atas seluruh pewartaanNya. Dalam Pedoman Umum Misale Romawi (PMUR) dikatakan bahwa keagungan sabda Allah menuntut agar dalam gereja ada satu mimbar khusus untuk pewartaan sabda, yang dengan sendirinya menjadi pusat perhatian umat beriman selama liturgi sabda berlangsung. Tempat pewartaan sabda sebaiknya berupa mimbar (*ambo*) yang tetap dan tidak dapat dipindah-pindahkan (PUMR 309).

Lebih lanjut PUMR mendeskripsikan bahwa mimbar adalah tempat untuk membawakan bacaan-bacaan suci, homili, mazmur tanggapan dan pujian paskah meriah. Hanya pelayan sabda yang telah ditentukan, selain kaum tertahbis, yang dapat mengemban tugas mulia di mimbar sabda demi menjaga keagungan mimbar sabda. Sebelum digunakan sebagai media pewartaan sabda, mimbar sabda baru harus diberkati menurut tata cara yang diuraikan dalam *Rituale Romanum* tentang ibadat pemberkatan.

Liturgi ekaristi merupakan perayaan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan seluruh karya penebusanNya secara sakramental dalam persekutuan umat beriman dengan pusatnya di mimbar sabda dan di altar suci (SC 7). Liturgi ekaristi terdiri atas dua bagian pokok, yakni liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Liturgi sabda, dengan pusat pelayanan di mimbar sabda, terdiri atas dua struktur pokok, yakni pewartaan sabda Allah dan tanggapan umat Allah atas sabda Allah itu (Martasudjita, 2009). Dengan demikian, liturgi sabda memuat suatu dialog perjumpaan antara Allah yang bersabda dan umat yang menanggapi sabda Allah itu. Pewartaan sabda Allah dilaksanakan dalam pembacaan kitab suci dan homili yang

memperdalam sabda Allah itu yang semuanya berpusat di mimbar sabda. Tanggapan umat Allah atas sabda Allah terungkap melalui mazmur tanggapan, bait pengantar injil, syahadat dan doa umat (doa permohonan).

Seluruh bagian dari liturgi sabda hendaknya dilaksanakan dari mimbar sabda (PUMR 58, 309). Melalui bacaan suci, yang selanjutnya diuraikan dalam homili, yang tersentral di mimbar sabda, sesungguhnya Allah sendirilah yang bersabda kepada umatNya (SC 33). Melalui pewartaan suci di mimbar sabda Allah menyingkapkan misteri penebusan dan keselamatan serta memberikan makanan rohani kepada umatNya (PUMR 55). Lewat sabdanya, Kristus sendiri hadir di tengah umat beriman, sebab Ia sendiri bersabda bila kitab suci dibacakan di dalam gereja (SC 7). Sabda Allah itu diresapkan oleh umat beriman dalam keheningan dan nyanyian, dan diimani dalam syahadat. Setelah dikuatkan dengan sabda, umat memanjatkan permohonan-permohonan dalam doa umat untuk keperluan seluruh Gereja dan keselamatan seluruh dunia.

Sabda suci yang dibacakan di mimbar sabda perlu dijelaskan oleh imam sebagai pemimpin liturgi ekaristi, melalui homili, agar umat yang hadir dapat memahaminya. Homili berasal dari bahasa Yunani *homilia* yang berarti percakapan atau komentar (Martasudjita, 2009). Homili merupakan pewartaan sabda Allah yang bertolak dari bacaan kitab suci dan memberi komentar dan penjelasan mengenai bacaan kitab suci itu. Ditinjau dari perannya, homili merupakan bagian dari liturgi sabda yang sangat penting setelah dipuncaki dengan bacaan injil. Melalui homili misteri iman yang sedang dirayakan dengan bertolak dari kitab suci yang dibacakan diwartakan dan didalami sesuai dengan bahasa dan situasi aktual jemaat.

Homili menjelaskan dan mengajarkan misteri Kristus berdasarkan pewartaan kitab suci sehingga misteri iman itu relevan bagi hidup umat zaman ini. Melalui homili dari mimbar sabda, sang pemimpin memperteguh iman umat dengan pengajarannya dan menghantar mereka ke dalam misteri sabda dan sakramen yang dirayakan. Dari hakikatnya ini maka homili selalu memuat ciri sakramental, dalam mana sabda Allah yang diwartakan berdaya untuk menyelamatkan umat. Homili mendorong umat untuk berani diutus mewartakan khabar baik kepada dunia (Martasudjita, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti mau mengeksplorasi respons para informan terhadap kekerasan simbolik yang terjadi selama ini di mimbar sabda. Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang tersebar di dua paroki pinggiran kota Merauke. Setiap paroki diambil lima orang sebagai informan dengan kategori sering mendengar kekerasan simbolik dan bahkan kekerasan verbal oleh otoritas Gereja di mimbar sabda dan merasa terganggu. Adapun kedua paroki yang menjadi asal informan adalah paroki Bunda Hati Kudus Wendu (5 informan) dan paroki Bunda Hati Kudus Kuper (5 informan). Teknik yang peneliti gunakan dalam menentukan informan adalah *purposive sampling*.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014) dipilih untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara; yang

mencakup tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang ada selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan simbolik di mimbar sabda cukup mengganggu umat Allah yang mengikuti perayaan ekaristi. Lebih jauh lagi kekerasan simbolik, dalam konteks tertentu, melecehkan dan melunturkan keanggunan dan keluhuran liturgi ekaristi yang sangat dijunjung tinggi dalam Gereja katolik. Fenomena ini harus segera diatasi supaya tidak berbias sehingga efek-efek yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap pastor paroki, sebagai otoritas Gereja tertinggi di parokinya, harus menghadirkan diri sebagai gembala yang baik, yang menunaikan pastoral kerahiman sebagai perpanjangan kasih Kristus yang paripurna kepada umat yang digembalainya (bdk Yoh. 10: 1-15 tentang gembala yang baik). Untuk itu, kesadaran akan keluhuran liturgi ekaristi dengan bagian-baginnnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh perlu dimiliki dan ditunjukkan oleh setiap pastor paroki sebagai otoritas Gereja di parokinya.

Untuk dapat membuktikan secara akurat bahwa kekerasan simbolik di mimbar sabda menjadi salah satu bentuk pelecehan terhadap keluhuran liturgi ekaristi, dapat kita simak dari deskripsi dan pembahasan hasil penelitian berikut ini. Hasil penelitian ini dipilah berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya dibagi berdasarkan unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan masalah yang dialami. Ada tiga kajian utama yang sekaligus menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Model-model kekerasan simbolik di mimbar sabda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua model kekerasan simbolik yang sering terjadi di mimbar sabda dengan pelaku utamanya adalah otoritas Gereja. Momentumnya adalah ketika sedang memberi homili dalam perayaan ekaristi. Kedua model kekerasan simbolik itu antara lain *eufimisme* dan *sensoris*. Melalui kedua model ini, imam sebagai pembawa homili, memberi nasehat dengan penekanan pada kata “harus” entah berkaitan dengan kata-kata Yesus sendiri sebagaimana ada di dalam kitab suci, maupun yang berkaitan dengan aplikasinya dalam kehidupan setiap hari. Nasehat dengan penekanan pada kata harus, yang disampaikan secara berulang-ulang, dalam momentum perayaan ekaristi yang berbeda-beda, dengan maksud yang sangat teologis, biblis, pastoral dan humanis, secara tidak langsung memaksa umat yang hadir dan mendengar homili tersebut, untuk melakukan apa yang disampaikan oleh sang imam – tanpa adanya pilihan lain, tanpa mereka sendiri menyadari bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan (tetapi dibungkus dengan kehalusan teologis). Keluhuran goal yang mau dicapai oleh umat beriman, menjadi alasan tersendiri bagi mereka untuk mengamini semua yang disampaikan oleh imam sebagai pemimpin perayaan ekaristi lewat homilinya.

Selain dalam bentuk nasehat dengan penekanan harus, kekerasan simbolik juga bisa diekspresikan dengan cara memberi peringatan kepada umat dengan formulasi; kalau melakukan konsekwensinya baik dan kalau tidak melakukan konsekwensinya fatal.

Peringatan bernada ancaman ini, dengan tujuan yang tentu amat luhur yakni demi keselamatan jiwa-jiwa, sesungguhnya adalah wujud nyata dari kekerasan simbolik. Imam, sebagai pemimpin perayaan ekaristi, dan umat yang hadir sama-sama tidak menyadari bahwa yang disampaikan oleh imam di mimbar sabda itu adalah sebuah kekerasan simbolik.

Walaupun umat tidak mengungkapkan secara terbuka suasana batinnya berkaitan dengan pengajaran imam selama ekaristi berlangsung, ataupun menunjukkan sikap menolak apa yang dilakukan oleh imam selama homili, tetap saja ada umat yang merasa terganggu. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan untuk bertahan berlarut-larut karena akan berbias, baik menimpa imam sebagai pemberi pengajaran dalam homili maupun umat Allah sebagai kelompok yang menerimanya.

Hasil penelitian yang ada sesungguhnya mendukung penelitian Fachrudin (2018), Martono (2012) dan Ningtyas (2015). Menurut Fachruddin (2018), kekerasan simbolik dapat dilakukan melalui dua cara, yakni (a) cara yang halus (*eufimisme*) dalam bentuk kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, dan belas kasihan; dan (b) cara sensoris, yang nampak dalam pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai moral kehormatan (Martono, 2012). Sensoris menjadikan kekerasan simbolik sebagai bentuk pelestarian semua nilai yang dianggap sebagai 'moral kehormatan' (Ningtyas, 2015).

Kewajiban yang harus dilakukan oleh umat beriman tanpa adanya opsi lainnya, sebagai konsekwensi dari ajaran imam sang pemimpin liturgi ekaristi dengan penekanan pada kata 'harus' adalah wujud yang paling halus dari kekerasan simbolik model *eufimisme*. Umat memandang apa yang disampaikan oleh imam adalah baik dan berguna untuk peziarahan kehidupan mereka selanjutnya. Keselamatan jiwa-jiwa yang adalah hukum yang tertinggi (bdk. Kanon 1752 Kitab Hukum Kanonik 1983), seakan membentengi dan menutup ruang untuk melihat dan mengkaji lebih jauh bahwa di balik tujuan luhur itu sesungguhnya sedang terjadi kekerasan secara simbolik, dengan pelakunya adalah otoritas Gereja sendiri sebagai pemimpin ekaristi dan korbannya adalah umat Allah sebagai peserta perayaan.

2. Faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan simbolik di mimbar pewartaan oleh otoritas Gereja.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan simbolik di mimbar pewartaan. Faktor-faktor itu antara lain kewenangan yang dimiliki oleh pastor paroki dalam memimpin liturgi ekaristi, sikap pasif umat terhadap setiap peristiwa selama perayaan ekaristi berlangsung, cara pandang umat terhadap kewenangan dan peran pastor sebagai otoritas Gereja setempat dan faktor personal imam yang memimpin liturgi ekaristi.

Dalam hubungannya dengan kewenangan pastor paroki hasil penelitian menunjukkan bahwa kerap kali pastor paroki melakukan kekerasan simbolik di mimbar sabda saat memberi homili. Pastor paroki tidak pernah merencanakan untuk melakukan kekerasan simbolik terhadap umat. Hal itu mengalir begitu saja dan merupakan bagian dari tugas kenabiannya. Setelah direfleksi dan diperkaya dengan berbagai teori tentang kekerasan sosial barulah disadari bahwa yang dilakukan selama ini dengan maksud yang amat mulia sesungguhnya tidak terlepas dari tindakan kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik berhubungan sangat erat dengan kewenangan yang dimiliki sebagai pastor paroki yang dalam bahasa sosiologi disebut sebagai kekuasaan. Kewenangan sebagai pastor paroki yang diberikan oleh hukum memberi ruang kepada siapapun yang mengemban tugas sebagai pastor paroki untuk terlibat dalam kekerasan simbolik tanpa yang bersangkutan menyadarinya. Struktur yang mengatur status dan kewenangan membuka peluang untuk hal ini.

Dalam kapasitas sebagai pemimpin tertinggi paroki, berbagai himbauan, penekanan, larangan, peringatan bahkan sampai ancaman yang dikemas dengan kata-kata biblis dan dalam rana pewartaan suci, menjadi tugas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Penyampaian yang cukup frekuentatif kepada umat tanpa disadari oleh pastor paroki sendiri maupun juga oleh umat paroki yang menghadiri perayaan ekaristi, adalah wujud dari kekerasan simbolik. Kekerasan ini didukung oleh struktur yang paten yang sangat dijunjung tinggi dalam Gereja katolik.

Temuan ini sesungguhnya mendukung teori Bourdieu. Menurut Bourdieu kekerasan simbolik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan (Jenkin, 1991). Kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan dan muncul sebagai dominasi kelas yang memiliki otoritas tertentu karena struktur sosial. Modal simbolik merupakan media yang memberi ruang dan memperlancar hubungan antara kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan simbolik berjalan dengan perlahan namun pasti; dan kelas yang terdominasi tidak menyadari bahwa mereka menjadi objek kekerasan dalam bentuk menerima apa yang dipaksakan secara halus oleh kelas yang memiliki otoritas dengan balutan tujuan yang luhur dan demi kebaikan mereka. Selanjutnya Jenkin (1991) menegaskan bahwa kekerasan simbolik kerap disebut sebagai kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*).

Sikap pasif umat yang mengikuti perayaan ekaristi, yang menerima begitu saja setiap bentuk kekerasan simbolik oleh otoritas Gereja, apalagi dalam balutan ruang kekudusan, menjadi salah satu faktor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas umat Allah merasa biasa dengan gaya homili imam sebagai pemimpin liturgi ekaristi. Sebagian kecil umat Allah, dengan daya kekritisan yang cukup, merasa bahwa apa yang dilakukan oleh otoritas Gereja, dengan memberi beberapa penekanan berulang-ulang, dalam momentum perayaan ekaristi yang berbeda (beberapa hari minggu berturut-turut), entah yang berisikan nasehat, teguran, peringatan, larangan maupun ancaman, sesungguhnya adalah wujud dari kekerasan simbolik.

Dalam kaitan dengan cara pandang umat terhadap posisi dan kewenangan imam sebagai otoritas tertinggi di paroki juga turut mendukung terjadinya kekerasan simbolik tanpa kedua belah pihak menyadarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar umat Allah berpendapat bahwa memberikan nasehat, teguran, peringatan, larangan, ancaman secara halus, bahkan kemarahan adalah hak imam yang memimpin ekaristi, karena melekat erat pada kewenangannya sebagai pemimpin tertinggi Gereja setempat. Bentuk kekerasan simbolik yang tidak terpisahkan dari tugas utama seorang imam di ruang homili adalah kewajiban yang harus dilakukannya sebagai wujud tanggungjawabnya terhadap pertumbuhan iman umat Allah yang berada di bawah kegemalaannya, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran iman dan moral kristiani.

Dalam hubungannya dengan faktor personal imam yang memimpin perayaan ekaristi, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter imam turut mempengaruhi terjadinya kekerasan simbolik di mimbar sabda. Imam yang cenderung berapi-api dan emosional dalam memberi homili, ruang untuk melakukan kekerasan simbolik melalui kata-kata ataupun gesture tubuh tanpa disadari, terbuka cukup lebar.

3. Dampak kekerasan simbolik di mimbar sabda

Hasil penelitian membeberkan tiga dampak dari kekerasan simbolik yang terjadi di mimbar sabda selama perayaan ekaristi berlangsung, khususnya pada bagian homili. Adapun ketiga dampak itu adalah sebagai berikut:

(a) Dampak kekerasan simbolik terhadap umat Allah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa umat yang sungguh konsentrasi dalam mengikuti perayaan ekaristi mingguan dan merindukan sapaan dan ajaran yang menyejukkan selama homili berlangsung merasa terganggu dengan beberapa pengulangan, entah berupa teguran, peringatan, larangan maupun nasehat, walaupun diupayakan oleh imam untuk dihubungkan dengan pesan injil yang menjadi pokok pewartaan pada hari minggu tersebut. Rasa tidak nyaman terkadang mengganggu umat Allah ketika masih berada di rumah dan sedang bersiap-siap untuk datang menghadiri ekaristi di gereja. Bagi imam, dengan peran sebagai otoritas tertinggi Gereja setempat dan juga pemimpin ekaristi, penegasan-penegasan yang bernada pengulangan dan peringatan (bahkan dilakukan secara kontinyu setiap hari minggu) sesungguhnya menjadi hal yang lumrah karena bertujuan untuk menyadarkan dan menyemangati umat. Namun karena frekwensinya berlebihan maka menimbulkan rasa bosan dan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hati umat Allah.

Sadar ataupun tidak, apa yang dilakukan oleh imam sebagai otoritas tertinggi Gereja setempat merupakan kekerasan simbolik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jenkin (1991) dan Fachruddin (2018). Menurut Fachruddin (2018), kekerasan simbolik dapat berwujud kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, dan belas kasihan. Kekerasan simbolik biasanya tidak tampak, bekerja secara halus dan tidak dapat dikenali.

(b) Dampak kekerasan simbolik terhadap keluhuran liturgi ekaristi

Sehalus dan semulia apapun pewartaan seorang imam di mimbar sabda selama perayaan ekaristi berlangsung, jika membuat umat Allah yang hadir terganggu, secara tidak langsung mengganggu dan mencacati juga keluhuran liturgi ekaristi; karena liturgi sabda dan liturgi ekaristi merupakan satu kesatuan. Pewartaan di mimbar sabda, yang diawali dengan bacaan-bacaan suci dan berakhir dengan homili, merupakan persiapan untuk masuk ke dalam misteri keselamatan yang sesungguhnya dan sekaligus menjadi puncaknya yakni liturgi ekaristi yang berpusat di altar (Martasudjita, 2009). Sebagai sebuah persiapan menuju puncak perayaan misteri keselamatan, maka segala faktor yang mengganggu dan menghambat harus dihindari. Salah satunya adalah kekerasan secara simbolik yang kerap kali dilakukan oleh imam di mimbar sabda, ketika memberikan homili.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan simbolik di mimbar sabda saat memberi homili sangat kerap terjadi. Dengan menggunakan alasan demi pembangunan jemaat dan pembangunan fisik pastor paroki dapat menyelipkan penegasan, himbauan, bahkan peringatan saat homili. Hal ini dilakukan setiap merayakan ekaristi hari minggu.

Ketika masih terbatas pada himbaun tentunya sah-sah saja. Namun kalau sudah menjadi peringatan, teguran bahkan bernada ancaman terhadap umat secara keseluruhan, dan kalau dilakukan berkali-kali, meski dalam kapasitas sebagai otoritas yang bertanggungjawab penuh terhadap pertumbuhan iman umat, hal ini mengganggu kesyahduan liturgi ekaristi.

Lebih jauh lagi, mimbar sabda bukanlah tempat untuk menyampaikan pesan yang mendatangkan ketidaknyamanan dalam diri umat sebagai peserta perayaan liturgi. Mimbar sabda adalah tempat untukewartakan sabda Tuhan yang adalah khabar gembira. Hal ini ditegaskan dalam PUMR (58, 309) bahwa seluruh bagian dari liturgi sabda hendaknya dilangsungkan dari mimbar sabda. Melalui bacaan suci, yang selanjutnya diuraikan dalam homili, yang tersentral di mimbar sabda, sesungguhnya Allah sendirilah yang bersabda kepada umatNya (SC 33). Melalui pewartaan suci di mimbar sabda Allah menyingkapkan misteri penebusan dan keselamatan serta memberikan makanan rohani kepada umatNya (PUMR 55).

Apapun bentuknya, kekerasan simbolik di mimbar sabda menodai dan melecehkan keluhuran liturgi ekaristi, karena ketika sabda suci diwartakan dan dijelaskan sesungguhnya Kristus sendirilah yang mewartakannya (SC 7). Lebih jauh dari itu, liturgi sabda merupakan persiapan untuk memasuki puncak perayaan misteri keselamatan dalam liturgi ekaristi, yang merupakan perayaan yang paling mulia (Martasujdita, 2009). Keluhuran perayaan ekaristi yang diawali dari ritus pembuka dan diakhiri dengan ritus penutup harus dijaga karena dalam keutuhan dan keanggunan itu Kristus hadir.

Liturgi ekaristi dengan semua unsur yang ada di dalamnya, mulai dari ritus pembuka sampai pada ritus penutup, merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipilah-pilah. Jika salah satu unsur, walaupun kecil, terganggu atau diabaikan maka akan mengganggu seluruh keutuhan perayaan liturgi.

(c) Dampak kekerasan simbolik bagi otoritas Gereja sebagai pemimpin liturgi ekaristi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imam sebagai otoritas Gereja setempat yang memimpin perayaan ekaristi, tidak menyadari bahwa kata-kata yang digunakannya dalam homili dengan tujuan mengajar, menyadarkan, menghimbau dan membangkitkan semangat umat merupakan wujud kekerasan simbolik. Kesadaran akan realitas bahwa ada umat yang merasa terganggu dengan penggunaan kata-kata yang bersifat repetisi dengan maksud menegaskan beberapa hal kepada umat dan bahwa tidak semua hal harus disampaikan dalam moment homili, menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi sang imam, baik sebagai pemimpin liturgi ekaristi setiap hari minggu maupun dalam kapasitasnya sebagai otoritas tertinggi Gereja setempat. Penemuan ini menjadi guru yang sangat baik bagi para imam untuk perannya selanjutnya teristimewa dalam merayakan liturgi bersama umat.

SIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa apa yang dirumuskan sebagai pokok permasalahan terjawab, yakni bahwa kekerasan simbolik di mimbar sabda oleh otoritas Gereja melecehkan keluhuran dan keanggunan liturgi ekaristi. Kekerasan simbolik kerap terjadi selama homili berlangsung dan tidak disadari oleh imam sebagai pemimpin perayaan, karena dipandang sebagai salah satu pola sekaligus menjadi kewajiban bagi mereka untuk menghimbau, menyadarkan dan membangkitkan semangat umat. Keluhuran perayaan

ekaristi harus dijaga dan dijunjung tinggi, yang diawali dengan ritus pembuka dan berakhir dengan ritus penutup, yang mengapit dua bagian pokok dan inti dari perayaan yakni liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Liturgi sabda, yang berpusat di mimbar sabda, merupakan persiapan untuk memasuki puncak perayaan misteri keselamatan dalam liturgi ekaristi yang berpusat di altar suci, yang merupakan perayaan yang paling mulia. Salah satu bagian kecil saja diabaikan, maka akan mengganggu keluhuran liturgi ekaristi secara keseluruhan; karena liturgi ekaristi mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup merupakan satu kesatuan yang integral.

Temuan ini sekaligus menyadarkan para imam sebagai pemimpin perayaan liturgi agar menggunakan mimbar sabda sesuai dengan fungsinya dan berhati-hati serta arif dalam menggunakan kata-kata selama membawakan homili. Hal-hal yang bersifat menghimbau, menegaskan, mengingatkan, melarang bahkan bernada mengancam dengan tujuan luhur untuk membantu umat Allah sebagaimana tidak disampaikan dalam homili sehingga tidak menimbulkan kesan seakan-akan dipaksakan supaya terkoneksi dengan pesan bacaan suci hari minggu.

Referensi

- Alabdali, T.S. 2019. Revisiting Brown and Levinson's Politeness Theory: A Middle-Eastern Perspective. *Bulletin of Advanced English Studies*, 2(2).
- Bellah, R.N. 2000. *Beyonf Belief: Esei-esei tentang agama di dunia modern*, Jakarta: Paramadina.
- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. 2012. *Linguistik Umum*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Choiriyah, Z. 2018. *Kekerasan verbal dalam pidato Aman Abdurahman*, Semarang: UIN Walisongo.
- Departemen Dokumentasi KWI, 1993. *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- Eryanti, L.D. 2017. Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, April – September 2017.
- Fachruddin, F. 2018. Kekerasan simbolik di sekolah (*Book Review*), dalam *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No. 2.
- Fatmawati, I, dan Sholikin A, 2020. Pierre Bourdieu dan konsep dasar kekerasan simbolik. *MADANI, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.12, No.1.
- Galtung, J. 1971. A structural theory of imperialism. *Journal of Peace Research*, Vol.8, No.2,
- Gasperz, M. 2022. Kekerasan verbal dalam mimbar pewartaan; salah satu factor determinan partisipasi umat katolik dalam hidup menggereja (*Manuskrip hasil penelitian*), Merauke: STK Santo Yakobus.
- Hendry, E. 2003. *Monopoli tafsir kebenaran, wacana keagamaan kritis dan kekerasan kemanusiaan*, Pontianak: Kalimantan Persada Press.
- Hendry, E. 2008. Kekerasan dalam Pendidikan. *Jurnal AT-TURATS*, Vol. 3, No.1, Desember 2008.
- Jenkin, R. 1992. *Pierre Bourdieu*, Canada: Routledge.

- Komisi Liturgi KWI, 2013. *Pedoman Umum Misale Romawi (PUMR)*, Ende: Nusa Indah.
- Martasudjita, E. 2009. Ekaristi; *tinjauan teologis, liturgis dan pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Martono, N. 2012. *Kekerasan di sekolah: sebuah ide sosiologi Pierre Bourdieu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ningtyas, E. 2015. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, *Jurnal Poetika* Vol. III No. 2.
- Riyanto, 2011. *Analisis Isi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Santoso, T. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat KWI, 1991. *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Obor.
- Syahrul, R. 2008. *Pragmatik kesantunan berbahasa menyibak fenomena bahasa Indonesia guru dan siswa*, Padang: UNP Press.
- Syukron, B. 2017. Agama Dalam Pusaran Konflik (studi analisis resolusi terhadap munculnya kekerasan social berbasis agama di Indonesia). *Jurnal RI'AYAH*, Vol. 02, No. 1, Januari – Juni 2017.
- Wahyudin, A, 2015. Kekerasan simbolik pada rubric mode dan cantik majalah femina, *Diksi, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 23 No. 1.
- Yuliani, S. 2019, *Tindak tutur kekerasan verbal dalam pidato Habib Rizieq*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta Press.
- Zikrillah, A. dkk. 2021. Perspektif Komunikasi Islam terhadap perilaku kekerasan verbal dalam permainan daring (studi kasus Game Mobile Legend: Bang Bang). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1. STK Santo Yakobus Merauke; gaspermario96@gmail.com